

SISTEM PASAR OUTPUT PENDIDIKAN ISLAM

Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe

Email: anggung.679@gmail.com

Abstrak.

Realitas sosial ekonomi memaksa penduduk muslim untuk lebih mementingkan pendidikan umum, sehingga menyingkirkan pendidikan agama kebelakang. Masalah umum yang tergambar terbagi menjadi dua, pertama, pada kasus negara mayoritas berpenduduk muslim, pemerintah belum memahami bahwa inti pembangunan bangsa melalui pendidikan adalah pembangunan manusia itu sendiri sebagai cara sekaligus tujuan. Pembangunan pendidikan diperhatikan tanpa adanya sinergitas dari domain kesejahteraan rakyat, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Kedua, pada negara minoritas, masalah yang dihadapi adalah kebijakan pemerintah yang protektif sehingga membatasi gerak lembaga pendidikan Islam dalam berinovasi. Perkembangan pendidikan ke arah positif harus dimulai dengan menciptakan sebuah pendekatan sistem dalam sektor pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar global. Karena pada dasarnya setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang rutin terjadi. Pendekatan sistem merupakan suatu filsafat tentang struktur yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam sebuah organisasi dengan cara yang paling baik. Kesimpulan dari artikel ini adalah, bagi pemerintah, ada tiga domain strategi dan kebijakan pendidikan untuk membangun sistem pendidikan efektif, yaitu pertahanan dan keamanan, angkatan kerja produktif, dan output social yang positif. Sementara bagi lembaga pendidikan, strategi dilakukan dengan (1) pemilihan dan pengembangan produk; (2) efektivitas pembiayaan untuk keunggulan bersaing; (3) mengembangkan modal manusia; (4) moving, caring, dan innovating; (5) strategi pemasaran; dan (6) strategi aliansi, membangun jaringan kerja dengan sinergitas.

Kata Kunci: Manajemen Sistem, Pasar Output, Pendidikan Islam

Abstract.

Social economic reality forced the Moslem population to be more concerned with general education so get rid of the religious education forward. A common problem that describe into two, the first in the case of a majority Muslim country the government does not understand that the core of nation-building through education is human development itself as a means and purpose. The second, in the case of a minority Moslem country the problem was faced is protective government policy until the movement of Islamic educational institutions in innovating was limited. This articles elaborates the illustration how education development to the right direction must beginning with a system approach in the education sector adjusted the need of the global market. Basically, every system created to handle something that routinely happens. Systems approach is a philosophy about the structure that coordinates activities in an organization with the most excellent way. The data collected for several books and journal which provided to the illustrations.

The conclusion, there are three domain strategies and education policies for the government to develop education system effectiveness, are defense and security, productive workforce, positive social output. Especially for education institution, the strategy is (1) selection and development of graduate products; (2) financial education effectiveness for competitive advantage; (3) developing human capital; (4) moving, caring, and innovating; (5) marketing strategy; and (6) alliance strategy, building a network with synergy.

Key Words: *System Management, Market Output, Islamic Education.*

A. Pendahuluan

Universalitas dan kosmopolitas agama Islam dalam berbagai segi kehidupan semakin mengakar dalam konteks pendidikan, sehingga Islam dijadikan sebagai paradigma ilmu pendidikan. Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan adalah suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan memahami realitas ilmu pendidikan (membangun manusia seutuhnya). Konstruksi pengetahuan itu dibangun oleh nilai-nilai Islam dengan tujuan agar kita memiliki kebijakan (wisdom). Mujib (2008:1-2) berpendapat dengan menjadikan Islam sebagai paradigma keberadaan ilmu pendidikan memiliki ruh yang dapat menggerakkan kehidupan spiritual dan kehidupan yang hakiki bagi wujud manusia.

Perwujudan manusia yang berkualitas menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi unggul, tangguh, kreatif, mandiri dan profesional pada bidangnya masing-masing. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi era globalisasi, khususnya globalisasi pasar bebas, seperti AFTA (*Asean Free Trade Area*), dan AFLA (*Asean Labour Area*) di ASEAN, maupun

di kawasan Negara-negara Asia Pasifik (APEC). (Mulyasa, 2004:3)

Menghadapi hal tersebut, perlu dilakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara *kaffah* (menyeluruh), terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, yang juga akan berpengaruh pada kualitas lulusannya, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Perlunya perbaikan sistem pendidikan sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Haryanah, 2004:504),

Istilah sistem dalam konteks pendidikan dimaknai sebagai kesatuan komponen dalam unsur-unsur pendidikan (pendidik, peserta didik, tujuan, materi, metode, alat pendidikan, teknologi) yang saling berhubungan satu dengan lainnya (Mastuhu, 2008:37). Cummins and Worley (2005:148) berpendapat pendidikan adalah kehidupan, yang membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (*life skill atau life competency*).

Dalam framework gagasan perubahan UNESCO yang berjudul "*A Decade of Progress on Education for Sustainable Development*" oleh Michelsen (2017: 34) dikemukakan sistem pendidikan harus mengalami perbaikan terintegratif dalam aspek teknologi, pembelajaran, dan materi. Hal tersebut selaras dengan konsep

pendidikan harus diletakkan pada empat pilar, yaitu belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*); belajar seumur hidup (*life long learning*) (Sigit, 2016: 789).

Sejarah pendidikan Islam telah menunjukkan bahwa keseimbangan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia (*sains*) terdapat pada masa kejayaan Islam. Keseimbangan ini kemudian terkikis seiring makin lemahnya kemunduran umat Islam yang notabene bukan karena Islam sendiri, tetapi lebih karena umat muslim menjauhi Islam (Hasan Langgulung, 1992: 117). Artinya, umat Islam ketika itu berfikir konservatif, menutup diri dari ilmu sains yang bersumber dari Barat. Hingga pada akhirnya muncul gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan untuk menciptakan masyarakat madani seperti yang dilakukan Jamaluddin, Rasyid Redha dan Muhammad Abduh.

Penelaahan kembali pada lembaga pendidikan Islam mendapat perhatian serius dalam usaha mempersiapkan masyarakat madani. Lembaga pendidikan Islam dituntut untuk menanamkan semangat ketuhanan sebagai pandangan hidup universal. Oleh Karena itu diharapkan muncul lembaga alternatif yang diharapkan mampu menyiapkan output lulusan yang bercirikan semangat keterbukaan, egaliter, kosmopolit, demokratis, dan berwawasan luas, baik menyangkut aspek spiritual dan ilmu umum (*modern sains*) (Nurcholish

Majid, 2002: 112).

Untuk merealisasikan visi pendidikan, dalam konteks pendidikan formal, terdapat sistem input-proses-output-outcome yang dalam teori *caos* and *complexity* tidak selalu berjalan sesuai harapan. Hubungan-hubungan fungsional antara murid, guru, sarana prasarana, saling mempengaruhi visi misi lembaga. Hubungan fungsional tersebut dapat dikatakan efektif dan produktif apabila melahirkan output sesuai dengan visi dan misi lembaga.

Fenomena yang terjadi bahwa output pendidikan hanya dimaknai berdasarkan nilai dan angka yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Seharusnya pendidikan Islam mampu memberikan nilai lebih pada output melalui pembaharuan sistem proses pendidikan berdasarkan tuntutan agama bukan hanya sebatas tuntutan pasar.

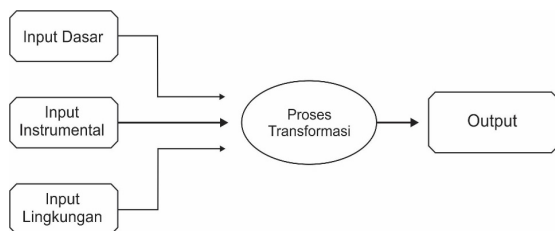
B. Pembahasan

1. Pengertian Sistem Pasar Output Pendidikan

Sistem adalah segala sesuatu yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi di antara komponen-komponen tersebut dan dari interaksi tersebut akan timbul sesuai hasil (*output*). Komponen yang ada disebut input, sedangkan interaksi antara input disebut proses (Gito Sudarmo, 2012: 128). Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu dengan lain, dan terpadu

(Tata Sutabri, 2005:2). Sistem dapat di kembangkan hingga menyertakan media penyimpanan.

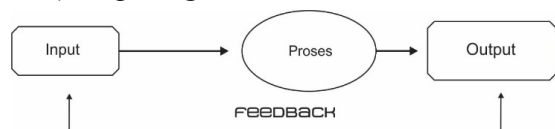
Sistem dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: 2.1: Sistem yang Tertutup.

Setiap sistem akan selalu memiliki komponen, (1) input dasar (*raw input*); (2) input perlengkapan (*instrumental input*); (3) input lingkungan (*environmental input*). Sistem sendiri ada dua macam yaitu (1) sistem tertutup dan (2) sistem terbuka. Pertama, sistem tertutup adalah dimana proses interaksi antar komponen terjadi di dalam sistem itu sendiri dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain dari luar. Kedua, sistem terbuka merupakan sistem dimana proses interaksi antar input akan selalu dipengaruhi oleh faktor lain dari luar.

Sistem ini memiliki sifat mengatur dirinya sendiri “*self regulation*”, maksudnya apabila hasil output kurang bagus, maka akan dilakukan perbaikan dan pembaharuan terhadap input kembali. Sistem terbuka juga memiliki apa yang disebut “*feed-forward information*” atau informasi balik yang datang dari output ke input maupun ke proses (Sudarmo, 2012: 129). Seperti gambar dibawah ini:



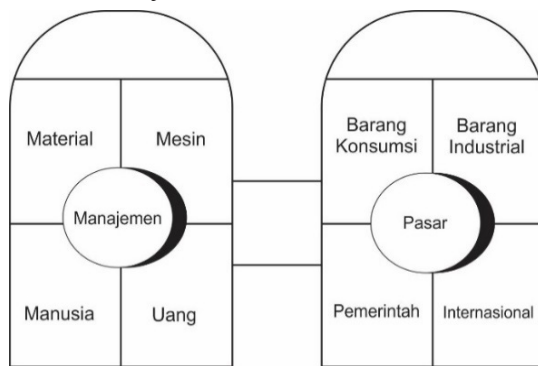
Gambar: 2.2: Sistem yang Terbuka.

Pengertian sistem secara umum dapat dirinci sebagai berikut: (a) setiap sistem terdiri dari unsur-unsur; (b) unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan yang bertalian erat satu dengan lainnya; (c) unsur-unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem, setiap sistem mempunyai tujuan tertentu; dan (4) Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar (Tata, 2005:4-6).

Menurut Gitosudarmo (2012: 6) pasar atau *market* timbul dari kebutuhan masyarakat dapat dibagi menjadi 4 jenis pasar yaitu:

- a. Pasar barang konsumsi (*consumer market*), pasar yang terbentuk oleh kebutuhan masyarakat akan barang-barang yang dikonsumsi sendiri;
- b. Pasar barang industry (*industrial market*), pasar yang terbentuk oleh kebutuhan dalam rangka akan menjalankan perusahaan atau bisnisnya;
- c. Pasar pemerintah (*government market*), pasar yang terbentuk oleh kebutuhan barang-barang dipergunakan untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugasnya;
- d. Pasar internasional (*international market*), merupakan pasar yang terbentuk oleh adanya kebutuhan dari masyarakat internasional, pasar ini dapat berbentuk pasar barang konsumsi, industry dan pemerintah. Sedangkan yang dimaksud

pengertian lain dari pemasaran adalah suatu fungsi organisasi yang selalu berusaha menjawab perubahan lingkungan. Sudarmo (2012, 192) mengungkapkan pengertian antara hubungan pasar dengan konsumennya dalam model 2.3.



Gambar: 2.3: Hubungan Sistem

Manajemen dengan Pasar.

Sudah diketahui bahwa pasar adalah hubungan keseluruhan dari permintaan dengan penawaran terhadap barang atau jasa. Sebuah kajian dalam situs economic holic (www. ekonomi-holic.com) hubungan antara pembeli dan penjual pasar dibedakan menjadi dua yaitu: pasar persaingan sempurna, dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari (1) pasar monopoli, (2) pasar duopoly, (3) pasar oligopoli; dan (4) pasar persaingan monopolistis.

Gambar 2.4 dibawah ini adalah bentuk persaingan pasar.

	Persaingan Sempurna	Persaingan Monopolistik	Persaingan Oligopoli	Monopoli
Jumlah Donatur	Sangat Banyak	Banyak	Sedikit	Satu
Jenis	Agak Kecil	Kecil	Besar	Raksasa
Persaingan Ekonomi	Tajam	Cukup	Ringan	Tanpa

Gambar: 2.4: Bentuk Persaingan Pasar.

Seperti bentuk persaingan monopoli, dimana satu pengusaha yang merupakan satu-satunya yang melayani kebutuhan seluruh masyarakat, seperti perum Telkom, perumka, pertamina dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan hal ini terlihat pada penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga di bawah kementerian yang sifatnya sekolah kedinasan. Dalam kajian ini untuk mengetahui dinamika perkembangan pendidikan Islam perlu belajar dari beberapa negara mayoritas maupun minoritas muslim yang berada di

kawasan Asia.

2. Karakteristik dan Kondisi Pendidikan Islam di Asia

Perkembangan Islam di Asia telah membawa peradaban-peradaban baru yang diakui Dunia Islam. Peranan seorang ulama dalam perkembangan pendidikan di sana sangat penting baik dalam segi dakwah dan dalam pengelolaan sekolah-sekolah. Walaupun Negara-negara dikawasan ASEAN sangat majemuk ditinjau dari aspek agama yang dianutnya, akan tetapi kerjasama itu perlu dilakukan

untuk membina harmoni di kawasan tersebut, dan membangun sikap saling menghargai antar pemeluk agama (Abidin, 2016). John I. Nwanko dalam Tilaar (2003: 202) mengungkapkan dimensi yang menjadi kerangka dari sistem pendidikan dengan skema dimensi ideology, dimensi political, dimensi teknikal dan dimensi pembangunan.

Di Negara mayoritas Islam, pada prinsipnya urusan Pendidikan menjadi wewenang pemerintah Negara dan ditetapkan dalam Konstitusi. Sedangkan di negara minoritas muslim agaknya pemerintah merasa perlu untuk memadu, mengatur, supaya aktifitas Islam di Negara tersebut tidak menjadi sumber instabilitas. Hal tersebut selain untuk menunjukkan peranan pendidikan untuk menghilangkan kekhawatiran warga non Muslim terhadap apa yang dibahasakan Mahathir sebagai “Islam Fundamentalis” yang diantaranya menginginkan penerapan hukum Islam dan atau terbentuknya Negara Islam (Suwito & Fauzan, 2003:155).

Mewakili pandangan tokoh Islam Asy-Syaibani tentang tujuan pendidikan Islam yaitu: Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani dan rohani, dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan akhirat (Abuddin Nata, 2010:35).

Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman

masyarakat. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat.

Kurikulum pendidikan Islam mengandung dua kurikulum inti sebagai kerangka dasar operasional pengembangan kurikulum. Pertama, tauhid sebagai unsur pokok tidak dapat dirubah. Kedua, perintah membaca ayat-ayat oleh para ahli pendidikan Islam memberikan interpretasi tersendiri. Prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam adalah: (1) adanya pertautan yang sempurna dengan agama; (2) prinsip universal pada tujuan dan kandungan kurikulum; (3) keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum; (4) perkaitan dengan bakat, minat, kemampuan-kemampuan dan kebutuhan pelajar dan juga dengan alam sekitar, fisik dan sosial tempat pelajar itu hidup berinteraksi; (5) pemeliharaan atas perbedaan-perbedaan individu diantara pelajar dalam bakat-bakat, minat, kemampuan, kebutuhan dan perbedaan lingkungan masyarakat; (6) penyesuaian dengan perubahan yang berlaku dalam kehidupan; (7) pertautan antara mata pelajaran, pengalaman dan aktifitas yang terkandung dalam kurikulum, dan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid dan kebutuhan masyarakat tempat tinggal murid.

Kurikulum pendidikan Islam dibangun berlandaskan akidah Islam sehingga setiap pelajaran dan metodologinya disusun selaras dengan

asas itu. Menurut Fahmy Luqman (2010:12) secara struktural dijabarkan menjadi tiga komponen sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: (1) pembentukan kepribadian Islami; (2) penguasaan tsaqâfah Islam; (3) penguasaan ilmu kehidupan (IPTEK, keahlian, dan ketrampilan).

Dalam kajian kurikulum, Davis, Bernadette Caruso dan Shade (1994:43) membenarkan kurikulum adalah pelaksanaan dan tuntutan yang berlebihan kepada guru materi untuk menghabiskan materi, karena hakekat pembelajaran adalah bagaimana membangun hubungan sosioemosional antara guru dan murid.

Kebijakan dan program keislaman dibidang pendidikan dengan meninjau ulang system pengajaran agama Islam yang dipandang tidak efektif dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Segera setelah itu, ia mengadakan pengkajian kembali tentang pendidikan agama Islam dan system pengajarannya serta membentuk dewan penasehat untuk pendidikan agama Islam. Pembentukan Dewan ini dimaksudkan untuk menggerakkan agar Islam menjadi relevan dengan kebutuhan modernisasi masyarakat Muslim Malaysia dan agar gerakan ini dapat dilaksanakan secara koordinatif dan sistematis.

Perkembangan selanjutnya adalah membentuk sekolah percontohan bagi lembaga pendidikan Islam lainnya. Lembaga model tersebut selain berfungsi sekolah pada umumnya, juga menjadi sarana pelaksanaan pelatihan guru-guru agama Islam. Dalam kasus tertentu (contoh:

Malaysia) pemerintah mengumumkan pengambil alihan sekolah Islam untuk direvitalisasi -manajemen, sdm- untuk dijadikan sebagai sekolah model.

Berkaca pada inovasi yang dilakukan pemerintah Malaysia adalah mendirikan Pusat Penelitian Islam Asia Tenggara (Syarifuddin Bashar, 2018). Formalisasi pelajaran Agama Islam hingga penetapan sebagai materi ujian di tingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Selanjutnya ada pendirian Maktab perguruan Islam (*Islamic Teacher's College*) senilai MS 22 juta, yang dari sana murid-murid berpotensi akan dikirim ke Mesir, Pakistan, dan Indonesia untuk melanjutkan study mereka (Asmawati Suhid, 2018).

Dalam penelitian Ghofur (2012:4), sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian: (1) pendidikan umum untuk laki-laki; (2) pendidikan umum untuk perempuan; dan (3) pendidikan Islam untuk laki-laki. Pendidikan bagi anak-anak wanita Saudi di kelola secara khusus oleh suatu badan yaitu *General Administration of Girls Education (GAGE)* yang di bentuk pada tahun 1960. Institusi pendidikan itu dikelola oleh kementerian pendidikan tinggi atau beberapa kementerian lainnya. Perkembangan pendidikan anak jenjang PAUD, TK dan SD berkembang pesat, alasannya (1) *efek headstar*, mulai lebih dulu, yaitu keyakinan orang tua bahwa memasuki TK akan membantu anak dalam belajar disekolah berikutnya; (2) jumlah

ibu-ibu yang makin banyak memasuki lapangan pekerjaan; (3) jumlah wanita lulusan perguruan tinggi yang tidak dapat pekerjaan mendorong pemerintah untuk membuka lebih banyak lembaga pendidikan pra sekolah untuk memperkerjakan mereka.

Khusus di Indonesia, pasca merdeka dari kolonialisme, madrasah dan sekolah dianggap kurang dapat mencetak manusia yang berkualitas, maka didirikanlah Pesantren terpadu, yang mencoba menggabungkan ilmu umum dan agama serta mengajarkan *life skill* dengan sistem pemondokan. Setelah terjadi tsunami, Aceh terbuka bagi dunia luar dan banyak donatur asing yang mendirikan lembaga pendidikan yang bertaraf internasional. Abdul Hadi (2014:194) dalam penelitiannya menerangkan masing-masing lembaga tersebut memiliki sistem yang berbeda-beda baik dalam sistem ideologi institusi, sistem kurikulum, semangat nasionalisme, sistem edukasi penempatan siswa dan sistem interaksi sosial.

3. Permasalahan Pendidikan Islam di Asia

Realitas sosial ekonomi di beberapa negara maju minoritas Islam (baca Singapura, Jepang, Cina) sekarang telah memaksa penduduk muslim untuk lebih mementingkan pendidikan umum, sehingga menyingkirkan pendidikan agama kebelakang. Kurangnya kurikulum yang sesuai standar dan tidak ada satu badan tunggal yang mempunyai wewenang untuk merencanakan silabus dan kurikulum dan membiayai madrasah sehingga madrasah tersebut dapat memberikan pendidikan

yang baik (Pendi Susanto, 2015).

Masalah pendidikan Islam di negara minoritas dirasakan oleh para pemimpin muslim baragam diantaranya: tujuan pendidikan islam dengan sistem pendidikan nasional belum tegas, tidak ada perguruan tinggi Islam, tidak ada kurikulum yang standar, tidak ada administrasi pendidikan islam sentral, kurangnya dana dan status ekonomi guru agama, dll.

Bahkan, karena khawatir keberlangsungan pendidikan Islam, beberapa negara membentuk lembaga otonom pendidikan Islam. Di Singapura dibentuk suatu organisasi yang bernama MENDAKI (majlis pendidikan anak-anak muslim), dalam rencana kerjanya, hal ini diarahkan pada pendidikan umum dan agama pada masyarakat secara berkesinambungan. Karena pendidikan menurut Islam, pemberian bekal bagi umat Islam agar mampu melaksanakan tanggungjawab mereka yang bersifat umum (duniawi) maupun agama.

Kurangnya interaksi sosial, realitas yang tampak sekarang adalah kurangnya sekolah-sekolah berbasis masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan lainnya yaitu sekolah, madrasah, dan sekolah internasional, mereka lebih memfokuskan diri pada pengembangan ilmu pengetahuan, etika dan teknologi. Langkah persuasive yang dilakukan adalah meningkatkan hubungan dengan masyarakat, para murid dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan, hal ini tentu saja disesuaikan dengan jam pelajaran yang ada di lembaga tersebut (Abdul Hadi, 2014:193).

Masalah umum yang tergambar terbagi menjadi dua, pertama, pada kasus negara mayoritas, pemerintah belum memahami bahwa inti pembangunan bangsa melalui pendidikan adalah pembangunan manusia itu sendiri sebagai cara sekaligus tujuan. Pembangunan pendidikan diperhatikan tanpa adanya sinergitas dari domain kesejahteraan rakyat, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Kedua, pada negara minoritas, masalah yang dihadapi adalah kebijakan pemerintah yang protektif sehingga membatasi gerak lembaga pendidikan Islam dalam berinovasi. Hal tersebut disebabkan banyak faktor, seperti rasa kekhawatiran yang berlebihan akibat doktrin Islam Radikal yang tersebar luas.

Terlepas dari itu semua, pemerintah berkewajiban menyiapkan pendidikan yang bertanggungjawab untuk menyediakan angkatan kerja yang produktif sebagai input industry dan menjadi pasar potensial bagi output industry. Pendidikan itu tidak mungkin tercipta tanpa badan yang sehat. Maka kebijakan dan kesejahteraan rakyat harus mendukung program pendidikan.

4. Pengembangan dan Pengendalian Sistem Pendidikan Islam

Perkembangan pendidikan ke arah positif harus dimulai dengan menciptakan sebuah pendekatan sistem dalam sector pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar global. Karena pada dasarnya setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang rutin terjadi. Pendekatan sistem merupakan suatu filsafat tentang struktur yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam sebuah organisasi

dengan cara yang paling baik.

Dalam sebuah workshop bertema 'Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional: Sistem Pendidikan Islam sebagai Pendidikan Alternatif Mewujudkan Indonesia yang Lebih Baik' di Kampus Institut Pertanian Bogor", Dr. Arim menerangkan bahwa sistem pendidikan Islam merupakan upaya sadar, terstruktur, terprogram dan sistematis untuk membentuk manusia yang berkarakter berkepribadian Islam, menguasai tsaqofah Islam, dan menguasai ilmu serta teknologi.

Nurchalis Majid dalam Yasmadi (2002:121), sistem pendidikan hendaknya memiliki keterpaduan antara unsur keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan. Sistem pendidikan terpadu ini diproyeksikan sebagai suatu alternatif untuk menuju masyarakat madani.

a. Keislaman

Anggapan terhadap Islam sebagai musuh kemajuan dalam pandangan Nurcholish (1992:37) berarti orang itu tidak memahami keuniversalan ajaran Islam. Ajaran Islam dengan jelas menunjukkan adanya hubungan organik antara ilmu dan iman. Hubungan organik itu dibuktikan ketika kaum muslim memiliki jiwa kosmopolit yang sejati yang kemudian membangun peradaban berdimensi universal (Nurcholis Madjid, 1992:24).

Perpaduan kedua komponen penunjang iptek dan imtaq diupayakan lewat perpaduan dua sistem pendidikan, tradisional dan modern. Memasukkan sistem pendidikan, baru' dalam dunia pendidikan Islam bukan berarti melepaskan

yang, lama'. Karena pada institusi pendidikan pesantren itu justru ada yang perlu ditumbuh kembangkan kembali. Tidak semua pada yang lama itu mesti di buang (Madjid, 1980:212).

b. Kenasionalan

Modernisasi pendidikan diharapkan menciptakan lembaga pendidikan yang mempunyai identitas kultural yang lebih sejati -pendidikan masyarakat- di dalamnya nilai universalitas Islam yang mampu melahirkan peradaban budaya -indigenous-setempat (Yasmadi, 2002:126). Konsep ini adalah upaya isasi dengan tegas dan jelas berlandaskan platform kean yang berakar dalam keindonesiaan dengan dilandasi keimanan.

Internalisasi nasionalisasi adalah proses penerapan nilai oleh pendidik dalam kehidupan. Upaya ini merupakan suatu proses tersusun secara sistematis dalam rangka penanaman semangat nasionalisme. Penerapan nilai nasionalisme dalam lembaga pendidikan Islam memperlihatkan lembaga tersebut sangat kuat menanamkan semangat nasionalisme (Abdul Hadi, 2014:192).

c. Keilmuan

Persoalan mendasar yang terjadi hampir merata di dunia pendidikan kaum muslim kontemporer adalah terpisahnya lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki konsentrasi dan orientasi yang berbeda, dalam bahasa Muhammad Abduh equalisasi terhadap dualisme pendidikan (dalam Fauzan, 2003:301). Maksudnya ada lembaga yang menitikberatkan orientasinya pada ilmu umum -sains-

dan di sisi lain ada lembaga yang hanya memfokuskan pada ilmu-ilmu tradisional. Realitas kelembagaan pendidikan ini lebih dikenal dengan dualisme pendidikan (Malik Fajar, 2008:87).

Demi 'mengakomodir' orientasi pasar yang lebih luas diharapkan isasi pendidikan untuk menghilangkan dualisme pendidikan tersebut. Kedua bentuk lembaga memiliki sisi positif yang patut dikembangkan dan kelemahan yang harus ditinggalkan. Usaha tertuju pada upaya untuk memadukan sisi baik antara keduanya, sehingga melahirkan sistem pendidikan yang ideal. Menurut salah satu tokoh reformasi pendidikan Muhammadiyah, Rasjidi (dalam Suwito, 2003:394), sistem pendidikan seperti ini disebut sistem pendidikan menuju kearah titik temu atau konvergensi. Tahapan peningkatan pengembangan dalam rangka menyongsong tantangan masa depan adalah: (1) daya baca terhadap prikehidupan yang sedang dijalani; (2) daya jawab problematika yang muncul; (3) inteegritas pribadi; (4) integritas wawasan; (5) kemampuan memelihara; (6) kemampuan menjabarkan misi Islam; (7) orientasi kosmopolit; dan (8) input sains, metodologi dan teknologi.

5. Strategi Menciptakan Output Berkualitas dalam Menghadapi Persaingan Pasar Global

Globalisasi pasar output dan kompetisi menciptakan suatu perubahan yang sangat besar. Strategi yang tepat harus diaplikasi untuk meraih keberhasilan melalui pemanfaatan peluang-peluang

yang ada pada lingkungan yang bergerak cepat dan semakin kompetitif.

Pemetaan network strategi menjelaskan awal dan inti kegiatan pendidikan. Ketika manusia adalah subjek mengubah peradaban suatu bangsa oleh karena itu pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem jaringan strategi dan kebijakan pembangunan.

Banyak lembaga pendidikan Islam telah menyadari hal tersebut dan memilih strategi yang tepat. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang tidak memperhitungkan implikasi langsung strategi tersebut terhadap sumber daya manusia. Negara yang tidak memiliki kesiapan strategi dan mampu bersaing dalam menghadapi pasar global tersebut, akan tergerus dan terpinggirkan (Mahmoud, 2004:93).

Menurut Kenneth Boulding (1956), pendekatan system dalam manajemen merupakan pendekatan yang ditetapkan paling akhir, dan dapat dipahami dengan sudut pandangan teori system umum atau analisis system. Kecenderungan pemimpin dalam sebuah organisasi adalah terlalu memusatkan perhatian pada salah satu komponen saja dari sistem organisasi padahal setiap unsur pembentuk organisasi adalah penting dan harus mendapat perhatian yang utuh agar manajer dapat bertindak efektif (Sutabri, 2012:2).

Bagi pemerintah, ada tiga domain strategi dan kebijakan pendidikan untuk membangun sistem pendidikan efektif, yaitu pertahanan dan keamanan, angkatan kerja produktif, dan output social yang positif. Sementara bagi lembaga

pendidikan, strategi dilakukan dengan memperhatikan faktor biaya, produk, sumber daya manusia, pemasaran, kerja sama, dan pandangan terhadap persaingan untuk menumbuhkan energi dalam bersaing (Ikhsan, 2009:9).

a. Pemilihan dan Pengembangan Produk

Tilaar mengartikan produk sebagai manajemen pengelolaan lembaga yang mencakup kurikulum, sistem pelayanan, dan tata kelola (Tilaar, 2003:45). Sementara Kotler yang diterjemahkan oleh Hendra (2014:53) produk dalam arti luas yaitu segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, dipergunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk didalamnya adalah fisik, jasa, orang, tempat, organisasi serta gagasan.

Terdapat tiga kategori produk dalam kontinum lokal sampai global: produk lokal, produk internasional, dan produk global (Djaslim Saladin, 2003:45). Produk lokal adalah produk yang dalam konteks tertentu. Produk Internasional adalah produk yang dianggap mempunyai potensial untuk diperluas kesejumlah pasar nasional. Produk global adalah produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

Dalam memilih produk yang akan dipasarkan ke pasar global, sebaiknya memilih produk (1) berkualitas dan berdaya saing; (2) memiliki diferensiasi dengan membangun *awareness* terhadap keunggulan yang ada dan manfaatnya; (3) produk yang *the First, the Best*, dan; (4)

inovatif, dengan kata lain, sebuah lembaga mungkin perlu mengembangkan rancangan produk baru untuk memenuhi keinginan dengan biaya yang terjangkau oleh pelanggan potensial (Ikhsan, 2009;14).

b. Efektifitas Pembiayaan untuk Keunggulan Bersaing

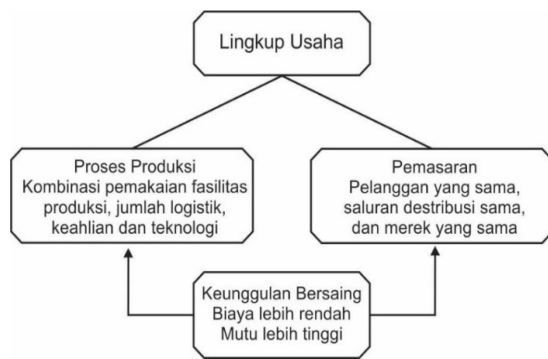
Dalam artikel yang dimuat Republika (2017) diungkapkan sistem pendidikan Islam solusi bagi pendidikan Nasional. Masalahnya, pembiayaan pendidikan dalam Islam terkait dengan politik ekonomi. Politik ekonomi Islam mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan pokok individu (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan pokok masyarakat (kesehatan, keamanan dan pendidikan) secara menyeluruh.

Menurut Suryadi (2016:33) efisiensi berarti ekonomis tidaknya suatu proses pembuatan suatu produk. Apabila prosesnya efisien berarti ekonomis dan mempunyai daya saing yang tinggi. Diartikan juga sebagai perang harga, strategi penetapan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Empat langkah yang menentukan harga dasar adalah (1) menetapkan elastisitas harga dari permintaan; (2) membuat perkiraan biaya tetap dari proses pelayanan, biaya adaptasi produk harus diperhitungkan; (3) menetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran; dan (4) memilih harga yang memberikan marjin kontribusi paling tinggi (Primasari, 2016:34).

Dari empat penentuan harga diatas, maka dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan harga dalam persaingan pasar. Selain itu, strategi lain yang dapat menyongsong persaingan dalam bidang harga yaitu:

- 1) Gunakan sistem *dumping*, tawarkan *everyday low price* atau menjual produk lebih rendah daripada yang biasanya dikenalkan pada produk yang sama di pasar domestik atau di Negara asal. Tunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan biaya dimata pesaing (*cost advantage*)
- 2) Harga Komplek. Tawarkan harga paket (*bundled prices*), paket harga dua produk (*two-part pricing*), kuantiti diskon, harga promosi, atau program loyalitas untuk beberapa produk, “beli dua dapat satu”.
- 3) Sesuaikan harga produk regular dalam merespon perubahan harga pesaing atau potensi lain untuk memasuki pasar.

Apabila harga jual produk mampu bersaing maka akan tercipta keunggulan bersaing (*competitive advantage*), sehingga biaya murah dan kualitas produk. Seperti gambar 2.6.



Gambar: 2.5: Kerangka Keunggulan akibat Efisiensi.

Jika semua pemangku pendidikan menjalankan program dengan benar, anggaran pendidikan di negara ini tidaklah sedikit. Sayangnya, dengan adanya permainan oknum-oknum, pemerataan penerimaan dana pendidikan pun menjadi tidak seimbang. Pendidikan yang berkualitas memang tidaklah murah. Pendidikan memang tidak harus murah atau gratis, namun pemerintah seharusnya menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh akses terhadap pendidikan yang bermutu. Idealnya, pendidikan di Indonesia harus dapat ditempuh oleh anak usia sekolah minimal SMA atau sederajat, tanpa memandang anak tersebut berasal dari keluarga kaya ataupun miskin.

Sebagai bentuk efektivitas pendanaan adalah upaya optimalisasi pengelolaan yang dilakukan dengan 2 cara, pertama cara tradisional adalah pemenuhan keperluan operasional pendidikan ketika ada pemasukan dari sumber-sumber biaya rutin, seperti orang tua siswa, murid, dermawan, atau pengajar itu sendiri. Tatkala sumber-sumber biaya tersebut kering, maka tertahanlah berbagai

kebutuhan pendidikan itu.

Kedua, sebagai bentuk antisintesis tradisional adalah non-tradisional, yaitu pengelolaan dana melalui perencanaan yang terarah sesuai kondisi lembaga dan untuk lembaga. Kajian kontemporer dalam hal ini adalah sistem wakaf yang tidak mengharuskan golongan tertentu yang merasa berjasa sebagai pengelola, tetapi fleksibilitas pengelolaan oleh orang yang amanah sesuai dengan nilai yang disepakati.

c. Mengembangkan Modal Manusia

Sumber Daya Alam menurut Gitosudarmo (2012:7) umumnya berupa “Material” atau bahan dasar maupun bahan pembantu. Kemudian sumber daya capital terdiri dari dua macam (1) “mesin-mesin” serta “modal” dan “money”. Yang paling penting diantara semua adalah “manusia” disebut sumber daya manusia atau SDM.

Mengacu pada pengetahuan dan kemampuan tenaga pendidikan. Dengan kata lain, tenaga pendidik dipandang sebagai sumber modal. Salah satu sarana mengembangkan modal manusia ialah program pelatihan dan pengembangan. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang urgen. Kualitas SDM berhubungan dengan produk yang dihasilkan, jika diproduksi oleh SDM yang berkualitas, maka produk yang dihasilkan adalah produk yang berkualitas.

Selain itu dapat digunakan strategi dalam istilah strategi korporasi yang terdiri atas tujuh unsur utama, yakni visi, misi, tujuan, sasaran, sumberdaya, bisnis, dan organisasi yang saling bergantung,

saling menguatkan dan berjalan konsisten. Konsisten disini maksudnya sesuai dengan visi dan misi yang menggambarkan sistem menciptakan nilai. Visual dari segitiga strategi seperti tergambar dalam model 2.6.



Gambar: 2.6: Segitiga Strategi Organisasi Publik dengan Kunci Strategi

Ketiga kunci strategi tersebut mengikat sisi-sisi segitiga yang terdiri dari (1) kunci koneksi logis (*coherent key*), kunci keunggulan bersaing (*competitive advantage key*), dan kunci pengawasan (*control key*).

Terlepas dari hal tersebut diatas, yang menjadi kunci pengembangan SDM adalah melalui program kaderisasi. Proses kaderisasi yaitu dengan mengirimkan kader-kader lembaga ke perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, mengawal ruh dan jiwa pengabdian serta mengembangkan kawasan keislaman dan keilmuan para kader.

d. *Moving, Caring, dan Innovating.*

Moving adalah kemampuan instansi untuk mengadaptasikan antara harapan konsumen terhadap suatu produk dan kemampuan untuk memenuhinya. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan konsumen yang akan menang dalam persaingan (Faisal Afif, 2017).

Dalam mewujudkan semua keinginan konsumen ini, agar berhasil baik,

moving harus disertai dengan *caring* dan *innovating*. Yang dimaksud dengan *caring* adalah kepedulian kepada konsumen. Dalam tahap *caring* ini perusahaan berusaha memahami sebaik mungkin apa yang dibutuhkan konsumen (Hitt, 2007:34).

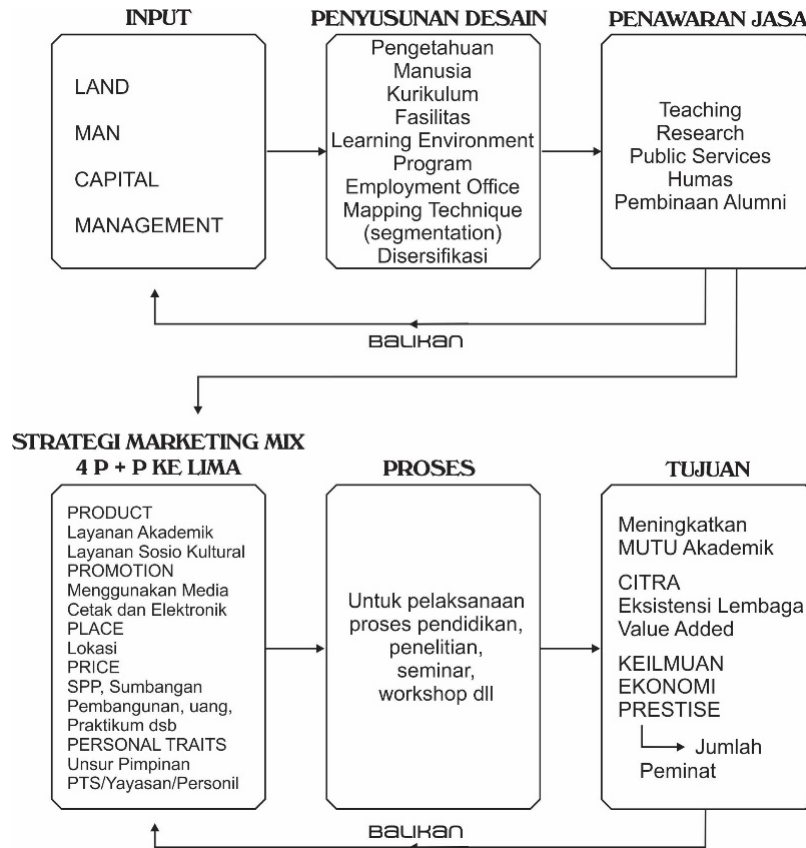
Untuk mewujudkan keinginan konsumen tersebut, inovasi dalam bidang produk meliputi kelengkapan produk dan juga teknologi terbaru. Inovasi ini tentunya hanya akan berhasil dipasaran apabila proses *caring* berjalan bagus. Dengan adanya loyalitas ini persaingan usaha menjadi tidak begitu berat, tinggal bagaimana kita menjaga pelanggan.

e. Strategi Pemasaran

Promosi atau komunikasi pasar merupakan bauran yang penting dalam marketing mix. (Kartajaya dalam Diana, 2003). Menurut Gitosudarmo (2012:1992), pemasaran adalah suatu fungsi organisasi untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan. Bentuk kombinasi kegiatan adalah proses produksi dan pemasaran agar tercipta tingkat efisien yang tinggi, Michael Porter meyorodkan konsep analisis nilai rangkaian (*chain value*) sebagai alat untuk meningkatkan keunggulan. Konsep nilai rangkaian adalah memilah rangkaian kegiatan dalam perusahaan menjadi dua, (1) kegiatan pendukung operasional dan (2) kegiatan utama operasi (Suryadi, 2016:34).

Selain mementingkan faktor kualitas sumber daya, organisasi dan bisnis yang baik, tetapi yang lebih penting bagaimana menyinergikan unsur-unsur tersebut dalam kerja sama secara menyeluruh (*integrated system*) seperti

model pemasaran dalam gambar 2.7.



Gambar: 2.7: Segitiga Strategi Organisasi Publik dengan Kunci Strategi

Pada gambar diatas dapat dilihat elemen bauran pemasaran yang terdiri dari 4P tradisional dengan penambahan 3P lagi yaitu: *Physical Evidence*, *People*, dan *Process* mempengaruhi calon konsumen sehingga mau mendaftar masuk. Informasi tentang 7P tersebut. Disamping itu menurut Buchari Alma (2016:373) terdapat empat faktor lain yang turut mempengaruhi pilihan yaitu, lingkungan sosio kultural, dari mana calon berasal, lingkungan politik dan hukum, lingkungan ekonomi dan teknologi.

Produk sering kali berada pada tahap yang berbeda dalam daur hidupnya diberbagai pasar nasional, karena terdapat perbedaan budaya, sosial, dan ekonomi

yang mendasar di pasar, maka daya tarik yang paling efektif untuk suatu produk adalah variasi sistem pengelolaan. Untuk itu dibutuhkan pengarahannya ini memperhatikan presentasi visual periklanan cetak dan disiarkan. Pertama, dialog atau narasi pendek dalam iklan televisi, dengan isi penjelasan minimal karena semakin banyak pembicaraan dapat mengurangi kepercayaan; Kedua, humor digunakan untuk menciptakan ikatan perasaan bersama.

f. Strategi Aliansi, Membangun Jaringan Kerja dengan Sinergitas
Strategi Aliansi atau perjanjian kerjasama merupakan salah satu bentuk kekuatan yang bermanfaat untuk bersaing

pada skala global dengan tetap menjaga kebebasan mereka. Menyusun kerjasama dengan instansi pendidikan baik yang berada di dalam dan luar negeri dengan strategi yang matang, dengan pandangan bahwa setiap instansi pendidikan memiliki kelebihan dan kekurangan, dari situ dapat diciptakan suatu model yang dapat di adopsi bersama sehingga memberikan nilai tambah.

Manfaatkan kemungkinan kerjasama, bentuk *strategic partnersip* dapat dilakukan dengan menawarkan kerjasama eksklusif, seperti program *student exchange*, pendidikan pelatihan guru dan lain sebagainya.

Sebagai upaya strategi aliansi salah satunya dengan mengusahakan terobosan-terobosan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak berkompeten khususnya dalam dunia pendidikan Islam. Mengunjungi lembaga-lembaga yang memiliki reputasi keislaman dan keilmuan tinggi, mengundang tokoh-tokoh dari dalam maupun luar negeri dan melakukan perjanjian kerjasama untuk kepentingan pengembangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengertian kompetensi tidak selalu ditafsirkan sebagai hasil persaingan, Islam mengajarkan agar berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hakikatnya, dari sebuah kompetisi bukan sekedar sekedar menangkalah, tetapi ada energi positif yang sangat besar, yang mengandung berjuta manfaat, dari sebuah kompetisi inilah yang dinamakan sebagai sebuah bentuk sinergi.

Konsep sinergi merupakan konsep

lain yang terkandung dalam definisi tentang sistem. Konsep ini mengandaikan bahwa dalam sistem, output organisasi di harapkan lebih besar dari output masing-masing bagian sehingga muncul sebuah upaya bersama, saling berhubungan, dan menghasilkan efek total yang lebih besar. Dalam pandangan demikian, dengan sinergitas yang terjalin maka Negara Indonesia akan lebih siap dan Optimis dalam menghadapi Pasar Global (Tata Sutabri, 2005:2).

C. Kesimpulan

1. Sistem adalah segala sesuatu yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi di antara komponen-komponen tersebut dan dari interaksi tersebut akan timbul sesuau hasil (*output*). Setiap sistem memiliki komponen, (1) input dasar (*raw input*); (2) input perlengkapan (*instrumental input*); (3) input lingkungan (*environmental input*);
2. Varian masalah pendidikan Islam di negara minoritas antara lain kejelasan dan ketegasan tujuan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional, minimnya perguruan tinggi Islam, tidak ada kurikulum yang standar, tidak ada administrasi pendidikan Islam sentral, serta status ekonomi guru agama;
3. Guna menghadapi tantangan masa depan dan dalam rangka menyikapi munculnyasplitpersonality, Institusi

pendidikan Islam diharuskan menerapkan konsep keterpaduan (keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan). Oleh karena itu diharapkan kebijakan negara melahirkan sistem pendidikan Islam yang komprehensif. Beberapa ide solutif yang dapat dilakukan yaitu (1) mengadakan pengkajian ulang tentang pendidikan agama Islam dan sistem pengajarannya agar Islam menjadi relevan dengan kebutuhan modernisasi masyarakat Muslim; (2) membuat sekolah percontohan bagi lembaga pendidikan Islam lainnya; kehadiran kepemimpinan transformatif yang kuat sehingga visi dapat tercapai secara efektif dan produktif; (3) penerapan otonomi dan MBS, turut menyiapkan masyarakat berfikir bahwa pendidikan sebagai human capital investment yang membantu proses penyelenggaraan pendidikan dalam level meso dan mikro.

4. Bagi pemerintah, ada tiga domain strategi dan kebijakan pendidikan untuk membangun sistem pendidikan efektif, yaitu pertahanan dan keamanan, angkatan kerja produktif, dan output social yang positif. Sementara bagi lembaga pendidikan, strategi dilakukan dengan (1) pemilihan dan pengembangan produk; (2) efektivitas pembiayaan untuk keunggulan bersaing; (3) mengembangkan modal manusia;

(4) *moving, caring, dan innovating*;
 (5) strategi pemasaran; dan (6) strategi aliansi, membangun jaringan kerja dengan sinergitas.

Daftar Pustaka

- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Abdul Ghafur. 2012. *Studi Tentang Potret Sistem Pendidikan di Saudi Arabia*. Sekolah Tinggi Agama Islam Pekalongan.
- Abdul Hadi. 2014. *Dinamika Sistem Pendidikan Institusi di Aceh*. Jurnal Ilmiah Peuradeun. Media Kajian Ilmiah. Politik. Hukum. Agama dan Budaya. Vol. 2. No. 3.
- Abudin Nata. 2010. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta. Rajawali Pers, 2010.
- Arim. 2014. 'Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional: Sistem Pendidikan Islam sebagai Pendidikan Alternatif Mewujudkan Indonesia yang Lebih Baik' di Graha Widya Wisuda Kampus Institut Pertanian Bogor IPB Darmaga.
- Asmawati Suhid. 2018. *Strengthening and Transformation of the Islamic Education System in Malaysia*. Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society.
- Basyar, Syaripudin. 2018. *Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Antara Konsepsi dan Aplikasi*. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam. 2018.
- Buchari Alma. 2016. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*.

- Bandung. C.V. Alfabeta.
- E. Mulyasa. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Rosda Karya. 2004.
- G. Michelsen and P. J. Wells, A Decade of Progress on Education for Sustainable Development Reflections from the UNESCO, Paris 07 SP, France, UNESCO 2017
- H.A.R. Tilaar. 2003. *Manajemen Pendidikan Nasional. Cet. Ke-6*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Hitt. M.A. 2007. *Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan dan Globalisasi*. Jakarta. Erlangga.
- <https://sbm.binus.ac.id/2013/09/02/alternatif-model-manajemen-perubahan-bagian-2/>
- <http://www.ekonomi-holic.com/strukturjenis-pasar-output/>. Diakses tanggal 27-11-2018.
- <http://www.panarchy.org/boulding/systems>. 2018 -Kenneth Boulding, *General Systems Theory, The Skeleton of Science*.
- Iksan. 2009. *Strategis dalam Kompetisi Pasar Global*. Jakarta. Gaung Persada Press.
- Indriyo Gitosudarmo. 2012. *Manajemen Strategis*. Cet ke-3. Yogyakarta. BPFPE.
- M. Ayoub, Mahmoud. 2012. *The Crisis of Muslim History*. Bandung. Mizan.
- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta. Paramadina.
- Susanto, Pendi. 2015. Perbandingan Pendidikan Islam di Asia Tenggara. *Jurnal*.
- Tata Sutabri. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta. Andi.
- Yasmadi. 2002. *Isasi Pesantren Kritik Nurcholis Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta. Ciputat Press.
- Zaenal Abidin. 2016. Peluang Dan Tantangan MEA: Kerjasama Pendidikan Indonesia di Kawasan Asean. *Ri'ayah*. Vol. 01. No. 01 Januari-Juni.